



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR: 188.44/K. 284 /2018

TENTANG

**PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018**

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menunjuk Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu;

b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berwenang dan bertanggungjawab:
1. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 2. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 3. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 4. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
 5. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 6. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
 7. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 8. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
 9. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
 10. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;

11. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
12. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
13. memberi label barang milik daerah;
14. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
15. melakukan *stock opname* barang persediaan;
16. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
17. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
18. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

KETIGA : Pengurus dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan diberikan honorarium sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 Maret 2018
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Kalimantan Utara.
2. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum


Djoko Isworo, SH, MH
NIP. 196209151988031002

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K. 284 /2018
TENTANG
PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARATAHUN 2018

NO	INSTANSI	NAMA	NIP	JABATAN
1	BIRO PEMERINTAHAN UMUM	DODY SUKMA ARTA PERMANA, S.IP	19931221 201802 1 002	PENGURUS BARANG PEMBANTU
2	BIRO HUKUM	MIFTAKUL TAMIM	19671230 200701 1 018	PENGURUS BARANG PEMBANTU
3	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	CHANDRA WIJAYA	19860613 201503 1 002	PENGURUS BARANG PEMBANTU
4	BIRO PEREKONOMIAN	ARIANSYAH	19930508 201503 1 001	PENGURUS BARANG PEMBANTU
5	BIRO PEMBANGUNAN	NATALYA TANDUNG PASA, SE	19801223 201503 2 001	PENGURUS BARANG PEMBANTU
6	BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA	SILAGUSTIN, A.Md	19710809 200604 2 013	PENGURUS BARANG PEMBANTU
7	BIRO ORGANISASI	ABDUL AZIZ, SE	19891018 201802 1 001	PENGURUS BARANG PEMBANTU
8	BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN	INDRA WIJAYA, Amd	19860805 201503 1 002	PENGURUS BARANG PENGGUNA
9	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	BERKY RIYAN PRAYUDI, S.I KOM	19890531 201503 1 002	PENGURUS BARANG PEMBANTU
10	SEKRETARIAT DPRD	HAMKA MS, SE	19730929 200312 1 008	PENGURUS BARANG PENGGUNA
11	INSPEKTORAT	NAOMI MANGASIK RAPPUN, SE	19831115 201101 2 007	PENGURUS BARANG PENGGUNA
12	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BAYU RAMADHAN, S.Kom	19830707 201503 1 002	PENGURUS BARANG PENGGUNA
13	DINAS KESEHATAN	MUHAMMAD FAZRANSYAH	19880721 201802 1 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA
14	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	KUNCORO, SE	19840617 201503 1 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA
15	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	NUR AZIZAH, S.KOM	19901101 201503 2 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA
16	DINAS SOSIAL	ANI SURYANI,SE,Sy	19910620 201503 2 003	PENGURUS BARANG PENGGUNA
17	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU	MARIYANA	19841021 201001 2 004	PENGURUS BARANG PEMBANTU
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	SAYID YAHYA A.Md	19890415 201101 1 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA

NO	INSTANSI	NAMA	NIP	JABATAN
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ILHAM HIDAYAT, ST	19841227 201001 1 018	PENGURUS BARANG PENGGUNA
20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	ENDAH ROSSYANA	19840619 201101 2 003	PENGURUS BARANG PENGGUNA
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	RACHMAT	19800422 200801 1 011	PENGURUS BARANG PENGGUNA
22	DINAS PERHUBUNGAN	BAGAS CAHYA NUGROHO,S.ST	19930512 201612 1 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	FATMAWATI	19901129 201101 2 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA
24	DINAS PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	HERY YANSEN	19730624 199803 1 005	PENGURUS BARANG PENGGUNA
25	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	TODING ALLO ELIA	19911013 201503 1 002	PENGURUS BARANG PENGGUNA
26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	CATUR SANDHIKA WIDY, S.Sos	19821010 201503 1 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA
27	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DIAH NUR MAULIDA, S.Pi.	19920911 201503 2 004	PENGURUS BARANG PENGGUNA
28	DINAS PARIWISATA	ACHMAD SAYIDI ARHAM, S.Psi	19900724 201503 1 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA
29	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	MUZAKKIR, SE	19880819 201802 1 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA
30	DINAS KEHUTANAN	PRIMA FERDIANSYAH, S.AP	19920710 201802 1 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA
31	UPT KESATUAN PENGELOLA HUTAN BULUNGAN	RAKHMAT SUPRIYADI, A.Md	19750604 200904 1 001	PENGURUS BARANG PEMBANTU
32	UPT KESATUAN PENGELOLA HUTAN MALINAU	M. ALI, A.MD	19750817 200701 1 42	PENGURUS BARANG PEMBANTU
33	UPT KESATUAN PENGELOLA HUTAN NUNUKAN	TATI WAHYUNI	19730602 200701 2 011	PENGURUS BARANG PEMBANTU
34	UPT KESATUAN PENGELOLA HUTAN KTT	RINA ISMAWATI, S.Hut	19780709 200101 2 001	PENGURUS BARANG PEMBANTU
35	UPT KESATUAN PENGELOLA HUTAN TARAKAN	ABDUL KABBA IQBAL, A.Md.	19770318 201001 1 001	PENGURUS BARANG PEMBANTU
36	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	HAIRYAH, A.MD	19770204 200701 2 021	PENGURUS BARANG PENGGUNA
37	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	SENTHIA VIVIN LILIT	19950917 201503 2 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA
38	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	JENE HANA WATRUTY,SE	19910108 201503 2 002	PENGURUS BARANG PENGGUNA
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	MEILEN MERANG	19820518 200604 2 028	PENGURUS BARANG PENGGUNA
40	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	DINA NYOLO NYOLO, SE	19791208 201503 2 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA
41	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	NURAINI LESTARI,S.STP	11921120 201406 2 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA
42	UPTD BPPRD BULUNGAN	MUHAMMAD HAIDIR	19730427 200801 1 012	PENGURUS BARANG PEMBANTU

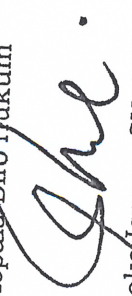
NO	INSTANSI	NAMA	NIP	JABATAN
43	UPTD BPPRD MALINAU	LUQMAN NUL HAKIM	19810620 201001 1 010	PENGURUS BARANG PEMBANTU
44	UPTD BPPRD NUNUKAN	SYAMSUL, SH	19750425 200604 1 019	PENGURUS BARANG PEMBANTU
45	UPTD BPPRD TANA TIDUNG	NATALIA KADANG, S.Hut	19801223 200904 2 003	PENGURUS BARANG PEMBANTU
46	UPTD BPPRD TARAKAN	SYARIFAH HADIZAH	19731125 199803 2 004	PENGURUS BARANG PEMBANTU
47	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	NUR KOMARIAH	19830611 201503 2 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA
48	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	RAHDANI	19741006 200701 1 012	PENGURUS BARANG PENGGUNA
49	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	TUANDI PRATAMA, S.IP	19910510 201503 1 003	PENGURUS BARANG PENGGUNA
50	BADAN PENGHUBUNG	DESI FARSANTI, A.Md	19771204 201001 2 003	PENGURUS BARANG PENGGUNA
51	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	AYOP CAHYONO, SE	19670825 199203 1 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA
52	RSUD TARAKAN	PRIYATIN	19781003 200901 2 003	PENGURUS BARANG PENGGUNA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

IRIANTO LAMBRIE

ttd


Djoko Isworo, SH, MH
NIP. 196209151988031002